

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas tersebut dilaksanakan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yaitu Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan pengelolaannya khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja untuk kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (Rahmayati, 2016).

Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penilaian kinerja tersebut dilakukan dengan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah ditetapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. Adapun manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah

dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya (Kurniati, 2012 dalam Rahmawati dan putra, 2016). Anggaran sebagai instrument kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah (Sijabat, *et al.* 2015).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi jenis-jenis keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisien keuangan daerah, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan. Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat

ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan di Kabupaten Sumba Timur adalah dengan memilih beberapa rasio ukuran kinerja seperti analisis rasio Pendapatan Daerah, analisis rasio Belanja Daerah dan analisis Pembiayaan.

Berikut disajikan data laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2016-2020.

Tabel 1.1
Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	Rp 78.663.755.972	Rp 68.222.357.518
2.	2017	Rp 122.378.367.821	Rp 98.205.464.855
3.	2018	Rp 97.265.244.668	Rp 75.375.667.964
4.	2019	Rp 100.107.236.357	Rp 101.397.593.906
5.	2020	Rp 90.971.520.245	Rp 92.336.687.883

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> tahun 2022

Tabel 1.2
Data Laporan Realisasi Belanja
Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	Rp 1.174.726.389.170	Rp 1.057.369.125.121
2.	2017	Rp 1.197.818.800.763	Rp 1.138.147.670.761
3.	2018	Rp 1.196.157.858.696	Rp 1.137.757.246.153
4.	2019	Rp 1.304.944.288.305	Rp 1.219.999.230.086
5.	2020	Rp 1.323.535.975.212	Rp 1.107.466.539.699

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> tahun 2022

Tabel 1.3
Data Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	Rp 55.361.311.300	Rp 90.064.861.404
2.	2017	Rp 51.975.738.005	Rp 105.160.241.440
3.	2018	Rp 79.421.671.018	Rp 80.025.756.891
4.	2019	Rp 53.641.605.932	Rp 29.600.969.739
5.	2020	Rp 27.381.716.239	Rp 38.007.381.823

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> tahun 2022

Berdasarkan ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, berbeda dengan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat juga dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa data anggaran belanja daerah Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Sama halnya juga dengan nilai realisasi belanja dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dan dilihat dari data penerimaan pembiayaan daerah tahun 2016-2020 nilai anggaran mengalami fluktuasi.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran untuk Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pemerintah Daerah dalam mengelola anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga masyarakat di daerah kurang optimal menerima manfaat anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Sumba Timur masih bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Padahal dilihat dari sektor pariwisata Kabupaten Sumba Timur sangat

mendukung untuk menambah Pendapatan Asli Daerah karena saat ini destinasi objek wisata Kabupaten Sumba Timur sedang mendunia yang menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung. Dan target pendapatan yang tidak dicapai, sehingga mempengaruhi realisasi belanja yang tidak dapat dicapai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2016-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2016-2020 dilihat dari rasio keuangan daerah.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya menganalisis kinerja keuangan untuk memperbaiki dan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai kinerja keuangan. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenisnya.